

sesuai keadaan, juga kebutuhan adanya koreksi atas kelemahan formulasi atau karena faktor perubahan lingkungan intern dan ekstern.

DPRD memiliki kewenangan nyata dalam era otonomi daerah. Kewenangannya dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah membuat DPRD dapat berperan besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik di daerah.

Peran DPRD menentukan peraturan daerah, alokasi anggaran, dan pelayanan publik untuk lebih berpihak kepada masyarakat. Untuk itu ditimbang sangat penting upaya penguatan kapasitas anggota DPRD, agar bias menjalankan kewenangan tersebut, sesuai dengan fungsi-fungsinya, dengan penuh amanah dan bermartabat. Anggota DPRD diharapkan mempunyai citra diri yang sesuai dengan posisinya yang terhormat dan mempunyai kapasitas yang memadai sehingga efektif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Upaya ini diharapkan bisa menjawab tantangan-tantangan berkaitan dengan anggota DPRD yang berasal dari berbagai latar belakang, tingkat pendidikan, sosial budaya, serta pengalaman dan harapan yang berbeda pula. Materi pelatihan yang ada di dalam modul ini diharapkan bias menjadi acuan peningkatan kapasitas DPRD dalam fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan fungsi representasi. Modul ini tidak saja menyajikan materi tentang peran dan fungsi DPRD, tetapi juga bagaimana membangun citra diri dan kepemimpinan seorang anggota DPRD yang bermartabat.

DPRD merupakan salah satu lembaga yang mempunyai beberapa fungsi, tugas dan wewenang di dalam kerjanya. didasarkan pada ketentuan Pasal 343 sampai dengan Pasal 344 Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

FKB Sumenep merupakan Salah satu Fraksi yang masuk dalam jajaran struktural DPRD Kabupaten sumenep yang sangat berperan aktif dalam berbagai bentuk program DPRD dan pemerintahan sumenep. Diantaranya di bidang hukum dan pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan lingkungan hal ini di orientasikan terhadap perwujudan kesejahteraan rakyat.

Peran dan posisi DPRD sangat penting dalam menentukan arah Pemerintah daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Karena DPRD berperan sebagai pemegang amanah rakyat harus menjamin kebijakan anggaran daerah ditujukan pada dukungannya kepada kesejahteraan rakyat dengan cara:

1. Berkreasi untuk kepentingan publik;
2. Mendatangkan kemajuan bagi rakyat dalam APBD;
3. Menganggap penting kebutuhan masyarakat.

Peran DPRD di dalam proses perumusan kebijakan APBD, sangat dipengaruhi oleh kapasitas individu dalam institusi pemerintahan daerah tersebut. Kemampuan anggota dewan untuk melakukan identifikasi masalah dan aspirasi masyarakat menjadi kunci pertama dalam melahirkan kebijakan anggaran yang

mewujudkan kebijakan anggaran yang pro rakyat miskin merupakan bentuk konkrit pertanggungjawaban atas mandat perwakilan dari masyarakat. Sebagai anggota dewan, sudah seharusnya mereka menumpahkan semua perhatian kepada masyarakat, terutama yang miskin. Bekerja secara serius untuk menaikkan pelayanan rakyat miskin melalui kebijakan anggaran akan menaikkan citra positif parlemen secara keseluruhan. Selama ini, pencitraan anggota legislatif belum kuat sebagai lembaga yang memiliki kepedulian secara langsung terhadap pengentasan pengentasan kemiskinan. Selain itu, Mengusahakan anggaran yang pro rakyat miskin berarti pula mendekatkan anggota dewan ke kalangan masyarakat sipil yang secara langsung sebagai konstituen nyata.

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin merupakan komitmen dari FKB DPRD yang senantiasa menjadi garapan utamanya. FKB DPRD sumenep selalu menguatkan kesadaran dan komitmen bahwa kedekatan dengan kontituen harus terjadi, dalam hal ini bukan hanya ketika membutuhkan suara dan dukungan dari masyarakat saat pemilu saja, namun juga dibuktikan pasca pemilu dengang menyuarakan dan memperhatikan nasib rakyat miskin. Artinya PKB mengasumsikan bahwa persoalan kemiskinan tidak melulu terletak pada kelangkaan atau kekurangan uang. Akan tetapi ada sistem atau kebijakan pemerintah yang kurang memihak pada masyarakat miskin. Dalam konteks inilah nilai-nilai atau prinsip-prinsip fiqih siyasah terlibat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat miskin.

B. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Fraksi Kebangkitan Bangsa Di DPRD Kabupaten Sumenep

Dari penjelasan di atas diketahui, bahwa jelas peran FKB DPRD Sumenep 2009-2014 merupakan salah satu bentuk FKB DPRD sumenep selalu berperan aktif dalam segala bentuk kinerja yang dilakukan oleh DPRD Sumenep, diantaranya di bidang hukum, pemerintahan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan.

Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-citakan PKB, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

undang – undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal – hal yang tidak diatur tegas oleh Al Qur'an dan Al-Hadis. *Keempat, Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya. *Kelima, Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* mengawasi jalannya pemerintahan.

Kekuasaan legislatif dalam Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Disamping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.akan tetapi dalam pendapat Muhammad Iqbal bahwa dalam penetapan itu haruslah sesuai dengan nash yaitu al-Qur'an dan Hadist.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka bisa dipahami, bahwa apa yang dilakukan FKB DPRD sumenep merupakan salah satu bentuk peran yang mengedepankan kepentingan rakyat, dengan analisa fiqih siyasah hubungannya dengan fiqih siyasah sebagai asas dan prinsip perjuangannya PKB dalam persoalan ini adalah terletak pada sikap *Maslahat* terhadap masyarakat atau kepentingan umum dan *'Adl* (adil).

Selain itu bahwa pada dasarnya negara diciptakan adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan negara adalah melindungi, mengayomi, memfasilitasi, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan rakyat.